

**LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM)
PENDATAAN TAAT PAJAK MASYARAKAT JOMBANG
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA
JOMBANG**



Oleh:

Erwin Himawan

1861295

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG
2022**

LEMBAR PENGESAHAN
KULIAH KERJA MAGANG (KKM)
LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG
ANALISIS KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA JOMBANG



Oleh:

Erwin Himawan 1861295

Mengetahui/Menyetujui
Dosen Pembimbing Lapangan

Jombang, 4 Januari 2022

Wenda Wahyu Christiyanto, SE., MM., CIQnR

Erwin Himawan

Mengetahui/Menyetujui,
Pendamping Lapangan

Andika Dharma Saputra

Mengetahui/Menyetujui,
Ka. Prodi Manajemen

Erminati Pancaningrum, ST., MSM.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan pertanggung jawaban kuliah kerja magang. Penyusunan laporan ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Kuliah Kerja Magang (KKM) bagi para mahasiswa STIE PGRI Dewantara Jombang dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang berjudul “Pendataan Taat Pajak Masyarakat Jombang pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jombang”

Penulis menyadari bahwa laporan ini tidak terselesaikan tanpa bantuan dari pihak yang terkait. Karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Abd. Rohim, SE., M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PGRI Dewantara Jombang.
2. Ibu Erminati Pancaningrum, ST., MSM. selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG.
3. Bapak Wenda Wahyu Christiyanto, SE., MM., CIQnR. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
4. Bapak Andika Darma Saputra selaku Pendamping Lapangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang
5. Bapak Agus Kisworo selaku Penanggung Jawab Rumah Berkas Kantor Pajak Pratama Jombang
6. Seluruh Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang yang telah membantu, membimbing, dan mengajarkan penulis selama di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan laporan kegiatan selanjutnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

Jombang, 4 Januari 2022



Erwin Himawan

DAFTAR ISI

Cover

LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I.....	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang Kuliah Kerja Magang.	2
1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang	3
Adapun maksud yang ingin dicapai dalam pembuatan Laporan Kuliah Kerja Magang ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem atau kebijakan yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang. Sedangkan tujuan dari Kuliah Kerja Magang (KKM) adalah :.....	3
1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang	4
1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang	5
Lokasi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang.....	5
1.5 Waktu Kuliah Kerja Magang	5
BAB II.....	6
TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG	6
2.1 Company Profil	6
2.1.1 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang	7
Gambar 2.1.....	7
Struktur Organisasi KPP Pratama Jombang.....	7
2.2.1 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang	12
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan	14
BAB III	16
PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM).....	16
3.1 Pelaksanaan Kerja pada KPP Pratama Jombang	16

3.2 Pendataan Taat Pajak Masyarakat Jombang pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jombang	18
3.2.1 Dokumen Wajib Pajak Orang Pribadi.....	18
3.2.2 Dokumen Wajib Pajak Badan.....	19
3.2.3 Dokumen Wajib Pajak Bendahara	20
3.2.4 Wajib Pajak dengan status cabang dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.....	20
3.2.5 Manfaat Nomor Pokok Wajib Pajak	21
3.3 Hasil Pengamatan di Tempat Magang.	22
3.4 Landasan Teori	23
3.4.1 Pendataan	23
3.4.2 Pajak.....	24
3.4.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	24
3.4.5 Jenis NPWP	25
3.4.6 Wajib Pajak.....	26
3.4.7 Pengelompokan Wajib Pajak	27
3.5 Taat Pajak	29
3.6 Usulan Pemecahan Masalah/Solusi.	40
BAB IV	42
PENUTUP	42
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran	42
4.3 Refleksi Diri	44
DAFTAR PUSTAKA	46

DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar 2.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Jombang</u>	5
<u>Gambar 3.1 Prosedur Pendaftaran NPWP</u>	25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Nama Pegawai KPP Pratama Jombang6

Tabel 3.1 Jam Kerja Kuliah Kerja Magang16

DAFTAR LAMPIRAN

<u>Lampiran 1 Surat Keterangan Melaksanakan Magang</u>	A-1
<u>Lampiran 2 Form Aktivitas Harian Magang/log book</u>	A-2
<u>Lampiran 3 Penilaian Pendamping Lapangan</u>	A-6
<u>Lampiran 4 Curriculum Vitae (CV)</u>	A-7
<u>Lampiran 5 Dokumentasi</u>	A-9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kuliah Kerja Magang

Kuliah Kerja Magang adalah mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester akhir khususnya pada semester 7 pada program studi S1 Manajemen di STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG, dan merupakan kegiatan intrakurikuler terstruktur berupa kegiatan terjun langsung di sebuah instansi terkait sesuai dengan jurusan yang diambil mahasiswa pada bidang ekonomi (khususnya Manajemen).

Kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan bahwa lulusan perguruan tinggi (fresh graduate) belum mampu secara optimal mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh ke dalam dunia kerja. Dengan diadakannya Kuliah Kerja Magang (KKM) ini sangatlah baik dan berguna bagi setiap mahasiswa/mahasiswi STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG, dikarenakan dapat digunakan sebagai suatu acuan atau gambaran yang nyata di dalam menjajaki dunia kerja yang akan segera dilakukan setelah lulus dari perguruan tinggi, dan menerapkan apa-apa yang telah didapatkan dari perguruan tinggi pada pekerjaan yang akan digeluti.

Melalui kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) mahasiswa dapat merasakan secara langsung bagaimana materi yang telah dipelajari saat perkuliahan menjadi berguna pada kegiatan tersebut. Disisi lain kegiatan magang juga menambah pengalaman bagi mahasiswa sebelum memulai dunia kerja yang sebenarnya. Adanya pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan adaptive seseorang di lingkungan kerja, menjadi bekal utama untuk meraih prestasi dan sangat memungkinkan untuk dapat mengaplikasikan ilmu dan pandangan yang telah didapatkan pada masa belajar.

Penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sinkron dan sistematis antara program pendidikan di STIE PGRI Dewantara dengan penguasaan keahlian profesional dalam pekerjaan tertentu. Maka dari itu, diperlukan sinergi antara dunia kerja dengan lembaga pendidikan dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia secara lebih luas. Kuliah Kerja Magang ini sekaligus dimaksudkan untuk

memahami dan mencari kemampuan dasar yang diinginkan di dunia kerja untuk dikembangkan di STIE PGRI Dewantara sebagai lembaga tenaga profesional yang berorientasi pada dunia kerja., serta mengetahui kemampuan dan pemahaman Mahasiswa atas mata kuliah yang didapatkan di kampus dengan di lapangan (dunia kerja).

Dari pemaparan diatas maka saya menimbang untuk mengangkat tema tentang SKI (Sasaran Kinerja Individu) yang diterapkan di perusahaan tempat magang saya selaku pelaksana, mahasiswa, untuk menunjang pelaksanaan praktek magang maka kami bertempat di . Kami beranggapan bahwa dengan memilih dan mengikuti praktek magang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jombang” dapat mengetahui dan memahami kondisi sistem kerja di bagian pemberkasan. Dengan demikian, saya dapat menjadi sumber daya manusia yang handal dan profesional.

Adapun secara garis besar hal – hal yang saya kerjakan selama melaksanakan KKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang yang dikerjakan sebagai berikut:

1. Penginputan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi dan Badan
2. Menyortir berkas pengajuan Nomor Pokok Wajib Pajak

Berdasarkan hal tersebut maka penulis memilih judul” **Pendataan Taat Pajak Masyarakat Jombang pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jombang**” sebagai judul Laporan Kuliah Kerja Magang (KKM).

1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang

Adapun maksud yang ingin dicapai dalam pembuatan Laporan Kuliah Kerja Magang ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem atau kebijakan yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang. Sedangkan tujuan dari Kuliah Kerja Magang (KKM) adalah :

1. Untuk memenuhi mata kuliah kerja magang dan menyelesaikan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Strata 1 di STIE PGRI Dewantara Jombang.
2. Untuk memberikan pengalaman serta gambaran kerja bagi mahasiswa, khususnya di bidang akuntansi.

3. Menerapkan pengetahuan teoritis yang didapat di dunia perkuliahan ke dalam dunia praktik kerja.
4. Mahasiswa diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan dunia kerja yang sesungguhnya.
5. Melatih kemampuan mahasiswa untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, mampu bersikap, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam bekerja.
6. Menumbuhkan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang lain di dalam dunia kerja.
7. Penulis dapat mengetahui sistem manajemen SDM yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Jombang.

1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang

1. Manfaat Bagi Penulis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri secara teoritis maupun praktis khususnya dibidang manajemen SDM
- b. Mahasiswa mendapat bentuk pengalaman nyata serta permasalahan yang dihadapi dunia kerja.
- c. Membangun mental mahasiswa terhadap Lapangan Pekerjaan yang sesungguhnya.
- d. Untuk menerapkan teori dan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan.

1. Manfaat Bagi Perusahaan

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang dengan STIE PGRI Dewantara jombang khususnya program studi strata 1 Manajemen SDM
- b. Membantu instansi dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari selama Magang.
- c. Hasil dari Penulisan Ilmiah ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang.

2. Manfaat Bagi Mahasiswa/Mahasiswa Lain

- a. Dapat dijadikan sebagai salah satu referensi tempat magang bagi mahasiswa/mahasiswi lain.
- b. Dapat berbagi pengalaman seputar pekerjaan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang

1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang

Lokasi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang
Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.157, Candi
Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61413

1.5 Waktu Kuliah Kerja Magang

Waktu : Waktu pelaksanaan program Kuliah Kerja Magang yaitu
Tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari
2022.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG

2.1 Company Profil

Peresmian Saat Mulai Operasi (SMO) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jombang terhitung mulai 1 Oktober 2018. Acara peresmian dilaksanakan di gedung baru KPP Pratama Jombang di Jl Merdeka No 157 Jombang (Senin, 1/10). Unit kantor yang semula bernama Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP pada posisi eselon IV meningkat menjadi eselon III.

Peresmian KPP Pratama Jombang dihadiri oleh Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, para pejabat eselon III di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur II, para pejabat pemerintah Kabupaten Jombang, para mitra bisnis, dan para stakeholder. Acara peresmian SMO KPP Pratama Jombang ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Jombang, Hj Mundjadah Wahab yang didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Arfan dan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II Neilmaldrin Noor.

Terhitung mulai 1 Oktober 2018 terdapat 23 unit kerja baru, salah satunya adalah KPP Pratama Jombang. Pembentukan KPP Pratama Jombang (1/10) ini merupakan hasil pemecahan dari KPP Pratama Mojokerto. Wilayah kerja KPP Pratama Jombang meliputi 21 kecamatan di Kabupaten Jombang, wilayah yang sebelumnya menjadi wilayah kerja KPP Pratama Mojokerto.

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab berharap dengan dibukanya kantor layanan baru di Jombang bisa meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, selain itu memudahkan akses Wajib Pajak untuk ke kantor pajak tanpa harus jauh-jauh ke Mojokerto. Diharapkan juga KPP Pratama Jombang juga terus melakukan sosialisasi kepada para Wajib Pajak di seluruh wilayah Kabupaten Jombang

2.1.1 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang

Visi :

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik
Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara

Misi :

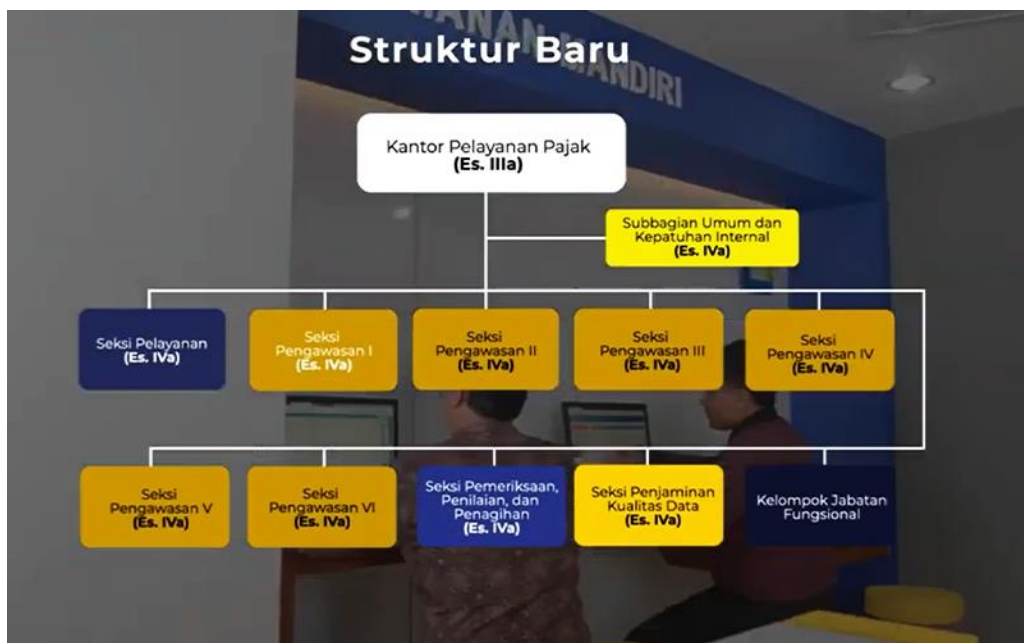
Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan :

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajaksukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Gambar 2.1

Struktur Organisasi KPP Pratama Jombang



Tabel 2.1

Daftar Nama Pegawai KPP Pratama Jombang

NO	NAMA	JABATAN	UNIT ORGANISASI
1	EKAWATI SURJANINGSIH	KEPALA KANTOR	KPP PRATAMA
2	ARIF MUSTOFA	KEPALA SEKSI	SEKSI PELAYANAN
3	AGUS MASDIANTO	KEPALA SEKSI	SEKSI PENJAMIN KUALITAS DATA
4	VEGA SUPARLAN	KEPALA SEKSI	SEKSI PEMERIKSAAN, PENILAIAN, DAN PENAGIHAN
5	REZA BAGUS FAHRUDIN	KEPALA SEKSI	SEKSI PENGAWASAN I
6	MAKMUR HADI	KEPALA SEKSI	SEKSI PENGAWASAN II
7	MUHAMMAD ARIF SUEFI	KEPALA SEKSI	SEKSI PENGAWASAN III
8	AIDIN FATHUR RAHMAN	KEPALA SEKSI	SEKSI PENGAWASAN IV
9	BAYU HARIADI	KEPALA SEKSI	SEKSI PENGAWASAN V
10	SRI HARTINI	KEPALA SEKSI	SEKSI PENGAWASAN VI
11	MUHAMMAD ADNAN MISBAH	KEPALA SUBBAG	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPATUHAN INTERNAL
12	AGUS KISWORO	PELAKSANA	SEKSI PELAYANAN
13	KASIONO	PELAKSANA	SEKSI PELAYANAN
14	SUWARNO	PELAKSANA	SEKSI PELAYANAN
15	HANIF SURYA NUGRAHA	PELAKSANA	SEKSI PELAYANAN
16	MUHAMAD WILDAN NURFATHONI	PELAKSANA	SEKSI PELAYANAN
17	RHEIZA ADITYA SANTOSO	PELAKSANA	SEKSI PELAYANAN
18	SALMATUN NISWA	PELAKSANA	SEKSI PELAYANAN
19	ELLA NOVITA RAHMA	PELAKSANA	SEKSI PELAYANAN
20	INTAN RACHMADANI NIRMALA	PELAKSANA	SEKSI PELAYANAN

21	ZULIA NI'MAH	PELAKSANA	SEKSI PELAYANAN
22	MOCH SYAMSUL A'RIF	PELAKSANA	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPATUHAN INTERNAL
23	ERWIN KURNIAWAN	PELAKSANA	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPATUHAN INTERNAL
24	DHARMAWAN SUBIYANTO	PELAKSANA	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPATUHAN INTERNAL
25	ANDIKA DARMA SAPUTRA	PELAKSANA	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPATUHAN INTERNAL
26	ANANTA DHARMA RAHMAN	PELAKSANA	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPATUHAN INTERNAL
27	MUHAMMAD IQBAL	PELAKSANA	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPATUHAN INTERNAL
28	MUTIARA RAISSA HAPSARI	PELAKSANA	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPATUHAN INTERNAL
29	SURYANI RADJILUN	PELAKSANA	SEKSI PENJAMIN KUALITAS DATA
30	NOFEL KHOLILI	PELAKSANA	SEKSI PENJAMIN KUALITAS DATA
31	RINASA DWI LIDIAWATI	PELAKSANA	SEKSI PENJAMIN KUALITAS DATA
32	BERLIA NURYANDA	PELAKSANA	SEKSI PENJAMIN KUALITAS DATA
33	SYAHZILI RAMADHAN	PELAKSANA	SEKSI PENJAMIN KUALITAS DATA
34	WIDIASTUTIK	PELAKSANA	SEKSI PEMERIKSAAN, PENILAIAN, DAN PENAGIHAN

35	MA'RUFATUL AZAMIYAH	PELAKSANA	SEKSI PEMERIKSAAN, PENILAIAN, DAN PENAGIHAN
36	DINDA IZZUN MAULIDA	PELAKSANA	SEKSI PEMERIKSAAN, PENILAIAN, DAN PENAGIHAN
37	MUHAMMAD ZAMZAMI RIZQI TOHIR	PELAKSANA	SEKSI PEMERIKSAAN, PENILAIAN, DAN PENAGIHAN
38	FALIYA IMASARI	PELAKSANA	SEKSI PENGAWASAN II
39	HAFIZ BALYA FATMALA	PELAKSANA	SEKSI PENGAWASAN V
40	RIVAN WIBOWO	PELAKSANA	SEKSI PENGAWASAN VI
41	NANANG KUSNADI	ACCOUNT REPRESENTATIVE	SEKSI PENGAWASAN I
42	ADI YAHYA SUMANTORO	ACCOUNT REPRESENTATIVE	SEKSI PENGAWASAN I
43	WAHYUNI	ACCOUNT REPRESENTATIVE	SEKSI PENGAWASAN I
44	SUDIARTO	ACCOUNT REPRESENTATIVE	SEKSI PENGAWASAN I
45	ABI LESMANA	ACCOUNT REPRESENTATIVE	SEKSI PENGAWASAN I
46	RISKI HANDAYANI	ACCOUNT REPRESENTATIVE	SEKSI PENGAWASAN I
47	DESIANA WITIANINGSIH	ACCOUNT REPRESENTATIVE	SEKSI PENGAWASAN II
48	ISYANNA WIDYAFURY	ACCOUNT REPRESENTATIVE	SEKSI PENGAWASAN II
49	GURUH ANJAR SASMITA	ACCOUNT REPRESENTATIVE	SEKSI PENGAWASAN II

50	AHMAD TRIAWAN	ACCOUNT REPRESENTATIVE	SEKSI PENGAWASAN II
51	HENNY RENGGOWATI	ACCOUNT REPRESENTATIVE	SEKSI PENGAWASAN III
52	DANIEL PUTRA HERDIYANTO	ACCOUNT REPRESENTATIVE	SEKSI PENGAWASAN III
53	AMIN JAUHARI	ACCOUNT REPRESENTATIVE	SEKSI PENGAWASAN III
54	YULIA KURNIA FITRI	ACCOUNT REPRESENTATIVE	SEKSI PENGAWASAN III
55	NUR KHOLIK	ACCOUNT REPRESENTATIVE	SEKSI PENGAWASAN IV
56	NANING TRI KUNTARIYANTI	ACCOUNT REPRESENTATIVE	SEKSI PENGAWASAN IV
57	LILIK WAHADI SOETJIPTO	ACCOUNT REPRESENTATIVE	SEKSI PENGAWASAN IV
58	IMAM BAGUS BUDIARTO	ACCOUNT REPRESENTATIVE	SEKSI PENGAWASAN IV
59	ANIK MARWIYANA	ACCOUNT REPRESENTATIVE	SEKSI PENGAWASAN V
60	AMILYA PUTRI RAHMADANTI	ACCOUNT REPRESENTATIVE	SEKSI PENGAWASAN V
61	DODY ARIS PERMANA	ACCOUNT REPRESENTATIVE	SEKSI PENGAWASAN V
62	ARIEF RAHMAN WIBISONO	ACCOUNT REPRESENTATIVE	SEKSI PENGAWASAN V

63	BUDI KURNIAWAN	ACCOUNT REPRESENTATIVE	SEKSI PENGAWASAN VI
64	MOCHAMAD MABRUR	ACCOUNT REPRESENTATIVE	SEKSI PENGAWASAN VI
65	NURI PERISKAWATI	ACCOUNT REPRESENTATIVE	SEKSI PENGAWASAN VI
66	FICKY HADI KURNIAWAN	ACCOUNT REPRESENTATIVE	SEKSI PENGAWASAN VI
67	DARU AKBAR NUR PRIMADI	JURU SITA	SEKSI PEMERIKSAAN, PENILAIAN, DAN PENAGIHAN
68	MUHAMMADURROCKY	JURU SITA	SEKSI PEMERIKSAAN, PENILAIAN, DAN PENAGIHAN
69	MUHAMMAD NURHAKIM PUTRA	BENDAHARAWAN	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPATUHAN INTERNAL
70	LUHUR BUDI PRIANGGA	SEKRETARIS	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPATUHAN INTERNAL
71	SRI TJMPONINGSIH	PENYULUH PAJAK AHLI MUDA	SEKSI PELAYANAN
72	PARTINI	PENYULUH PAJAK AHLI MUDA	SEKSI PELAYANAN
73	AJENG MUSTIKA ARUM SARI	PENYULUH PAJAK AHLI MUDA	SEKSI PELAYANAN
74	MOHAMMAD ADEN	ASISTEN PENYULUH PAJAK TERAMPIL	SEKSI PELAYANAN
75	RIZKI WAHYU NUGROHO	ASISTEN PENILAI PAJAK TERAMPIL	SEKSI PEMERIKSAAN, PENILAIAN, DAN PENAGIHAN

76	ENDHY APRIYANTO	PEMERIKSA PAJAK MUDA	
77	AINUR SAJAD	PEMERIKSA PAJAK MUDA	
78	FARID SU'UDIN	PEMERIKSA PAJAK MUDA	
79	DICKY RADITYO BAKHTIAR	PEMERIKSA PAJAK PELAKSANA LANJUTAN	
80	ALFAN ZUHRIFAN	PEMERIKSA PAJAK PELAKSANA	
81	ARWIN NUGROHO	PEMERIKSA PAJAK PELAKSANA	
82	MOHAMADDAFI JAZULI	PEMERIKSA PAJAK PELAKSANA	

2.2.1 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang

Dalam menjalankan tugasnya KPP Pratama Jombang dipimpin oleh satu Kepala Kantor dan dibantu oleh Seksi-Seksi yang masing-masing dikepalai oleh kepala seksinya dimana tugasnya antara lain :

1. Kepala Kantor

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak dibidang PPH, PPN, PPnBM, Pajak tidak Langsung lainnya dan PBB serta BPHTB dalam wilayah Lingkup Wilayah Jombang.
- b. Bertanggungjawab mengamankan penerimaan pajak di Kota Jombang.
- c. Melakukan pembinaan terhadap pegawai di KPP Pratama Jombang.

2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub bagian umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, melakukan pemantauan pengendalian inter, pemantauan pengelola resiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

3. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

4. Seksi Penjamin Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyaJian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

5. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

6. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI

Masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

a. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak.
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
4. Penyuluhan perpajakan.
5. Pelayanan perpajakan.
6. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.
7. Pelaksanaan ekstensifikasi.
8. Pengurangan sanksi pajak
9. Pelaksanaan pemeriksaan pajak
10. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
11. Pelaksanaan konsultasi perpajakan
12. Pembetulan ketetapan pajak
13. Pelaksanaan administrasi kantor

BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM)

3.1 Pelaksanaan Kerja pada KPP Pratama Jombang

Waktu pelaksanaan program Kuliah Kerja Magang yaitu tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022. Kegiatan KKM ini dilakukan sesuai hari kerja yang berlaku di KPP Pratama Jombang, yaitu hari Senin hingga Jumat dengan waktu :

Tabel 3.1

Jam Kerja Kuliah Kerja Magang

Hari Kerja	Jam Kerja	Keterangan
Senin – Jumat	08:00 - 12:00	Jam Kerja
	12:00 - 13:00	Istirahat
	13:00 - 16:00	Jam Kerja

Selama masa pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) di KPP Pratama Jombang, praktikan ditempatkan di bagian Pemberkasan NPWP dengan tugas utama menginput berkas pendaftaran wajib pajak terutama input Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu praktikan juga melakukan pengarsipan berkas yang kemudian diletakkan pada lemari tempat khusus arsip berkas.

Pada hari pertama melaksanakan magang praktikan diarahkan oleh pembimbing lapangan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jombang untuk naik ke lantai atas dan menerima pengarahan untuk melakukan absen magang melalui grup magang yang telah disediakan oleh pembimbing lapangan yang ada di KPP Pratama Jombang, di grup Whats App khusus mahasiswa magang KPP Pratama Jombang diberikan sebuah link yang isinya presensi masuk dan pulang dan pencatuman foto selfie bukti mahasiswa melaksanakan magang baik WFO dan WFH, serta mengenai ruangan atau tempat yang akan dijadikan

tempat praktik magang selama 30 hari kedepan melaksanakan Kuliah Kerja Magang.

Saat hari pertama magang tanggal 1 desember 2021 saya ditugaskan diruang pemberkasan dengan tugas pertama saya dengan beberapa tahapan kerja yakni:

1. Pertama diberikan map berisi berkas pendaftaran (Nomor Pokok Wajib Pajak) NPWP Orang Pribadi maupun Badan.
2. Mengecek ada atau tidaknya data (Nomor Pokok Wajib Pajak) NPWP pada berkas pada link KPP yang sudah disediakan.
3. Memberi kode pada setiap map yang berisi lembaran berkas wajib pajak
4. Menginput nama dan (Nomor Pokok Wajib Pajak) NPWP sesuai kode yang telah ditulis pada berkas ke dalam file excel yang telah disediakan khusus untuk penginputan (Nomor Pokok Wajib Pajak) NPWP.
5. Praktikan mengumpulkan dan memasukkan berkas ke dalam map, setiap map berisi 50 sampai 100 berkas wajib pajak baik pribadi maupun badan, serta memberikan kode pada map besar khusus pengumpulan berkas data NPWP wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
6. Setelah semua tertata rapi dalam map, praktikan memasukkan ke dalam lemari berkas sesuai kode berkas di lemari maupun di kertas berkas data NPWP wajib pajak baik pribadi maupun badan.

Semua tahap pekerjaan ini saya lakukan selama saya Work From Office (WFO) pada hari yang ditentukan oleh pembimbing lapangan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jombang, biasanya setiap mahasiswa magang yang ada di KPP Pratama Jombang dan ditempatkan diruang pemberkasan diberikan tugas yang sama oleh karyawan yang ada dibagian tersebut dengan tiap pengerjaan dokumen input dengan kode yang berbeda pada tiap lemari yang sudah disediakan. Biasanya mahasiswa yang WFO diberikan jatah atau waktu magang selama 3 hari dalam 5 hari waktu kerja dalam tiap minggunya. Selain 3 hari tersebut, mahasiswa magang diberikan waktu Work From Home (WFH) selama 2 hari kerja. Serta tetap melakukan absensi mahasiswa magang melalui grup magang yang disediakan dan mengklik atau masuk pada link dan melakukan absen sesuai ketentuan arahan yang diberikan diawal.

3.2 Pendataan Taat Pajak Masyarakat Jombang pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jombang

3.2.1 Dokumen Wajib Pajak Orang Pribadi

1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa :
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau
 - 2) Fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing.
2. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa :
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing, dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/ bukti pembayaran listrik; atau
 - 2) Fotokopi e-KTP bagi Warga Negara Indonesia dan surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, permohonan juga harus dilampiri dengan :
 - 1) Fotokopi Kartu NPWP suami;

- 2) Fotokopi Kartu Keluarga; dan
- 3) Fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.

3.2.2 Dokumen Wajib Pajak Badan

1. Untuk Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang berorientasi pada profit (profit oriented) berupa :
 - 1) Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
 - 2) Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing dan
 - 3) Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik.
2. Untuk Wajib Pajak badan yang tidak berorientasi pada profit (non profit oriented) dokumen yang dipersyaratkan hanya berupa: fotokopi e-KTP salah satu pengurus badan atau organisasi, dan surat keterangan domisili dari pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).

3. Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajaksesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), berupa :
 - 1) Fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint Operation)
 - 2) Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
 - 3) Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing
 - 4) Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

3.2.3 Dokumen Wajib Pajak Bendahara

Untuk Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berupa :

- 1) Fotokopi surat penunjukan sebagai Bendahara; dan
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

3.2.4 Wajib Pajak dengan status cabang dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Dokumen yang dilampirkan berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak pusat atau induk;

- 2) Surat keterangan sebagai cabang untuk Wajib Pajak Badan; dan
- 3) Fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya SLurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak badan; atau
- 4) Fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/ bukti pembayaran listrik atau surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

3.2.5 Manfaat Nomor Pokok Wajib Pajak

Walaupun NPWP merupakan dokumen yang penting, masih banyak orang yang tidak mengerti dan tidak membuat NPWP. Padahal, NPWP memiliki banyak manfaat didalam ataupun diluar perpajakan loh! Contohnya sebagai berikut :

1. Persyaratan Administrasi
Dengan memiliki NPWP, kita akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus persyaratan administrasi seperti di bank. Beberapa instansi perbankan saat ini mengharuskan memasukkan nomor NPWP sebagai salah satu syarat utama atau syarat dokumen pendukung untuk mengurus administrasi di tempat tersebut. Contohnya adalah kredit bank, rekening dana nasabah (RDN), rekening efek, rekening bank, pembuatan SIUP (Surat izin Usaha Perdagangan), dan pembuatan paspor.
2. Mempermudah Urusan Perpajakan

Manfaat lain dari NPWP adalah berkaitan langsung dengan kemudahan pengurusan segala bentuk administrasi perpajakan. Jika tidak memiliki NPWP, anda bisa jadi tidak diperkenankan untuk membuat dokumen-dokumen tersebut. Contoh dokumen administrasi yang memerlukan NPWP adalah pengurusan restitusi pajak, pengajuan pengurangan pembayaran pajak, mengetahui jumlah pajak yang mesti dibayar, dan lain-lain. Dengan memiliki NPWP, maka Wajib Pajak akan terhindar dari sanksi hukum. Karena bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan ketentuan yaitu mempunyai NPWP, akan terkena sanksi pidana sesuai dengan pasal yang berlaku.

3.3 Hasil Pengamatan di Tempat Magang

Selama pelaksanaan kegiatan KKM, praktikan menemukan beberapa kendala yang terjadi di KPP Pratama Jombang khususnya di rumah berkas. Kendala-kendala tersebut berupa :

1. Tempat yang kurang nyaman untuk digunakan sebagai tempat untuk bekerja. Banyaknya tumpukan berkas dan dokumen pendaftaran NPWP yang harus diinput serta luas ruang kerja yang dirasa kurang untuk menyimpan berkas yang lumayan memakan tempat, sehingga kondisi di dalam rumah berkas terkesan berantakan dan kurang nyaman untuk bekerja. maka sebaiknya disediakan tempat yang lebih memadai dan cukup luas untuk dapat menampung berkas-berkas dan dokumen yang ada.
2. Komposisi ruang kerja terkesan berantakan karena kurang efisien dibandingkan tempat atau ruang arsip. Kami menyarankan Anda untuk mengatur ruang Anda seefisien mungkin sehingga orang yang bekerja dengan Anda merasa nyaman dan file serta dokumen Anda lebih bersih, dan dengan pengaturan ruang yang tepat, Anda dapat memaksimalkan pekerjaan yang ada.
3. Kurangnya staf atau operator yang ditempatkan di bagian pendaftaran untuk mengelola file yang ada. Saat ini jumlah pegawai yang ditempatkan pada bagian pendaftaran adalah 1 pegawai atau staf. Hal ini dinilai tidak mencukupi

dan berlebihan dibandingkan dengan jumlah berkas yang banyak, sehingga memerlukan pemasukan dan pendataan berkas wajib pajak yang lengkap di bagian penyerahan.

3.4 Landasan Teori

3.4.1 Pendataan

a. Pengertian Pendataan

- Pendataan memiliki 3 arti menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yakni:
 - 1) Pendataan berasal dari kata dasar data
 - 2) Pendataaa adalah sebuah homonim karena memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda
 - 3) Pendataan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pendataan dapat menyatakan nama dari seseorang tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Pendataan nomina (kata benda)

1. Proses cara, perbuatan mendata
2. Pengumpulan data
3. Pencarian data

Kesimpulannya, arti kata pendataan adalah proses cara, perbuatan mendata. Arti lainnya dari pendataan adalah pengumpulan data.

- Pendataan menurut Herlambang (2005), merupakan suatu proses pencatatan keterangan yang benar dan nyata tentang sesuatu, baik manusia, benda, lingkungan, maupun kejadian tertentu. Pencatatan ini dimaksudkan sebagai suatu dokumentasi atau arsip yang dapat digunakan untuk suatu keperluan di masa depan.

b. Manfaat Pendataan

Pendataan dilakukan untuk basis data sebagai dasar bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pemerataan. Pembangunan dimulai dari perencanaan yang baik, dan perencanaan berdasarkan data yang akurat.

3.4.2 Pajak

1) Pengertian Pajak

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbala secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2) Syarat Pemungutan Pajak

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007, agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

3.4.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Siti Resmi dalam bukunya yang berjudul Perpajakan (2008 : 26) adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Setiap wajib pajak hanya diberikan satu nomor pokok wajib pajak. NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan dalam administrasi perpajakan.

Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP saja. Nomor NPWP terdiri dari 15 digit angka, 9 digit angka pertama merupakan informasi

kode wajib pajak, dan 6 digit terakhir merupakan informasi kode administrasi. Struktur lebih merinci dari NPWP dapat dilihat pada gambar di atas. Penjelasan arti kode NPWP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dua digit (XX) pertama menunjukkan identitas Wajib Pajak, Contoh, 01 – 03 adalah Wajib Pajak Badan, 04 – 06 adalah Wajib Pajak Pengusaha, dst.
2. Enam digit (YYY.YYY) setelahnya menunjukkan nomor registrasi atau nomor urut KPP yang diberikan oleh kantor pusat DJP.
3. Satu digit (Z) selanjutnya berfungsi sebagai kode pengaman agar tidak terjadi kesalahan atau pemalsuan NPWP.
4. Tiga digit (XXX) selanjutnya merupakan kode KPP terdaftar.
5. Tiga digit (YYY) terakhir adalah status Wajib Pajak (Tunggal, Pusat atau Cabang). 000 untuk status Wajib Pajak Tunggal atau Pusat, sedangkan 001, 002, dst untuk status Wajib Pajak Cabang.

3.4.5 Jenis NPWP

Ada 2 jenis NPWP yaitu NPWP Pribadi dan NPWP Badan. Berikut adalah perbedaannya :

1. NPWP Pribadi yaitu NPWP yang dimiliki secara individu yang memiliki penghasilan di Indonesia. Berikut ini individu yang masuk ke daftar NPWP pribadi, yaitu :
 - Memiliki Penghasilan dari Pekerjaan
 - Memiliki Penghasilan dari Pekerjaan Bebas
 - Memiliki Penghasilan dari Usaha
2. NPWP Badan yaitu NPWP yang dimiliki oleh setiap perusahaan atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Berikut ini perusahaan yang masuk ke dalam daftar NPWP Badan, yaitu :
 - Badan milik Pemerintah
 - Badan milik Swasta

3.4.6 Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. NPWP diberikan kepada Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. NPWP tidak berubah meskipun Wajib Pajak pindah tempat tinggal/tempat kedudukan atau mengalami pemindahan tempat terdaftar.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2006 : 20) menjelaskan pengertian wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang telah ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dan dari penjelasan diatas dapat disimpulkan mengenai pengertian wajib pajak adalah badan ataupun orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan telah ditentukan untuk melaksanakan segala kewajiban dan hak dalam bidang perpajakan, yang termasuk tidak hanya pemungut pajak atau pemotong pajaka melainkan pembayar pajak juga termasuk didalamnya.

3.4.7 Pengelompokan Wajib Pajak

Tabel 3.4.7

Pengelompokan Wajib Pajak

Kelompok	Kategori	Keterangan
Wajib Pajak Orang Pribadi	Orang Pribadi (Induk)	Wajib Pajak belum menikah, dan suami sebagai kepala keluarga
	Hidup Berpisah (HB)	Wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim
	Pisah Harta (PH)	Suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis
	Memilih Terpisah (MT)	Wanita kawin, selain kategori Hidup Berpisah dan Pisah Harta, yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya

	Warisan Belum Terbagi (WBT)	Sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris
Wajib Pajak Badan	Badan	Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
	Joint Operation	Bentuk kerja sama operasi yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atas nama bentuk kerja sama operasi
	Kantor Perwakilan Perusahaan Asing	Wajib Pajak perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing (<i>representative office/liaison office</i>) di Indonesia yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
	Bendahara	Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dan diwajibkan melakukan

		pemotongan atau pemungutan pajak
	Penyelenggara Kegiatan	Pihak selain empat Wajib Pajak badan sebelumnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan

3.5 Taat Pajak

Kesadaran sukarela dan kepedulian wajib pajak sangat sulit untuk diterapkan kecuali definisi 'pajak' mencakup frasa tidak dapat dan wajib. Berawal dari ayat ini, jelaslah bahwa membayar pajak bukan sekedar tindakan sukarela atau pengakuan. Ayat ini mewujudkan semangat kerja keras atau semangat persatuan bangsa untuk pembangunan perekonomian nasional, sehingga masyarakat memahami dan memahami bahwa ia berkewajiban untuk secara sukarela memenuhi kewajibannya membayar pajak dan memenuhi kewajibannya kepada pemerintah.

Selama ini kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak belum sesuai harapan. Pada umumnya masyarakat masih merasa sinis dan tidak percaya dengan adanya pajak karena masih merasa seperti upeti, merasa terbebani, seringkali sulit untuk membayar, dan tidak mengerti apa dan bagaimana pajak itu serta sulit dan sulit untuk dihitung. laporkan mereka. . Namun, upaya untuk mengenali kesadaran pajak dengan baik masih mungkin dilakukan, dan bukan tidak mungkin. Seperti yang diketahui masyarakat, membayar pajak bersifat sukarela, bukan wajib. Kesadaran akan perlunya membayar pajak ini tidak hanya bermuara pada ketaatan, kerendahan hati, dan disiplin, tetapi juga disertai dengan sikap kritis.

Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, misalnya penerapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek di lapangan dan

perluasan subjek dan objeknya. Masyarakat di negara maju memang telah merasakan manfaat pajak yang mereka bayar. Bidang kesehatan, pendidikan, sosial maupun sarana dan prasarana transportasi yang cukup maju maupun biaya operasional aparat negara berasal dari pajak mereka. Pelayanan medis gratis, sekolah murah, jaminan sosial maupun alat-alat transportasi modern menjadi bukti pemerintah mengelola dana pajak dengan baik. Dengan kesadaran pajak ini meningkat, kami berharap Indonesia akan mencapai kemakmuran yang diharapkan selama ini. Slogan “Bayar pajak dan amati pemakaiannya” bukan hanya lantang dan gaungnya, namun nyatanya dapat dilihat bahwa pajak merupakan pendapatan utama negara dan dialokasikan serta dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. kepentingan orang. Contoh bagaimana memahami dan menerapkan Panchashila harus diberikan di mana langkah-langkah strategis diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela bagi wajib pajak. Kita sering mendengar tentang bagaimana panchasila ditumbuhkan. Untuk tujuan ini, sebuah proyek bernama P4 (Panduan Memahami dan Mengamalkan Pancasila) dimulai pada masa Orde Baru. Yang tidak akan terlupakan oleh mereka yang telah mempelajari P4 dalam ingatan kita adalah seni memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila untuk mengolahnya.

Langkah-langkah yang diambil dianggap berhasil karena mempromosikan pengembangan kesadaran pan-politik murni dan membentuk orang-orang pan-etnis dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pan-pandisme. Tidak ada salahnya melakukan "ATM" (amati, tiru, dan ubah), mengutip salah satu kutipan yang sering dilontarkan pimpinan DJP dari briefing. Dalam kaitan ini, tugas-tugas tersebut tidak hanya mencakup departemen hubungan masyarakat yang secara struktural dan organisasional bertanggung jawab atas tugas-tugas suara dan keamanan garda depan Pelayanan Pajak Nasional, tetapi juga semua pejabat Pelayanan Pajak Nasional yang melaksanakan tugas-tugas tersebut. Sinergi antar otoritas pajak sangat diperlukan. Banyak media dalam negeri yang memberitakan bagaimana persepsi masyarakat terhadap pembayaran pajak telah berubah. Ada juga kajian dan kajian terkait hal ini. Kesadaran sukarela dan kepentingan wajib pajak sangat penting. Ini adalah bentuk hubungan yang hidup berdampingan dan merupakan satu dorongan yang harus ditangkap DJP untuk mencapai tujuannya. Wajib pajak

meningkat sejak tahun 2008, terutama sejak dimulainya program PWPM setelah program sunset policy, modernisasi DJP, dan penerimaan pemerintah di bidang perpajakan juga meningkat signifikan. Namun, masih memiliki potensi yang signifikan atau, dalam istilah pemasaran, "pangsa pasarnya belum mencapai kejenuhan, sehingga masih bisa dijual." Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam acara yang diselenggarakan di Gedung Bank Indonesia Jalan M. H. Tamrin Jakarta Pusat pada Agustus 2011 mengatakan.

Selain banyaknya pengusaha nasional yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak juga masih minim. Dari 238 juta jumlah penduduk Indonesia, hanya 7 juta saja yang taat pajak. Kalau seandainya terdapat 22 juta badan usaha, hanya 500.000 yang membayar pajak. Itu harus ditingkatkan kembali. Jumlah angkatan kerja masyarakat Indonesia sebanyak 118 juta dari total penduduk 238 juta. Sebanyak 40 persen dari angkatan kerja tersebut berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jadi, jika dikalkulasikan, terdapat sebanyak 44 juta sampai 47 juta penduduk Indonesia yang seharusnya membayar pajak. Senada dengan pernyataan di atas Direktur Jenderal Pajak A Fuad Rachmany dalam seminar 'Pajak dan Zakat Relevansinya Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan' di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta Sabtu (21/5 2011) menyatakan sebagai berikut:

Masih jutaan yang belum bayar pajak, mungkin 50 juta. Berdasar data penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Pajak tahun 2010, orang pribadi yang menyampaikan SPT Pajak hanya mencapai sekitar 8,5 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia sekitar 240 juta jiwa. Dari jumlah 8,5 juta orang itu pun sebagian merupakan SPT nihil. Penerimaan pajak pada 2010 mencapai Rp 600 triliun. Dari jumlah itu, sebesar sekitar Rp 300 triliun berasal dari pajak perusahaan atau badan yang jumlahnya 500 badan/ perusahaan. Jumlah penerimaan Rp 300 triliun itu sebagian besar yaitu 98 persen berasal dari 200.000 perusahaan."

"Sementara itu dari 8,5 juta WP orang pribadi, penerimaan pajaknya mencapai Rp 200 triliun. Jumlah Rp 200 triliun itu sebagian besar atau 98 persen berasal dari 500.000 WP orang pribadi golongan kaya dan menengah. Ini artinya Indonesia saat

ini hanya bergantung kepada satu juta WP perusahaan dan orang pribadi. Ini sangat menyedihkan padahal jumlah penduduk 200 juta lebih.

Salah satu ciri negara maju adalah jika kesadaran masyarakat membayar pajak tinggi, mendekati 100 persen Seandainya dari 50 juta yang belum bayar pajak, sudah membayar kewajibannya tentu Indonesia akan lebih maju dari sekarang. Berbagai pendekatan dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib pajak. Indikasi tingginya tingkat kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak antara lain:

- 1) Realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 2) Tingginya tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa.
- 3) Tingginya Tax Ratio
- 4) Semakin Bertambahnya jumlah Wajib Pajak baru.
- 4) Rendahnya jumlah tunggakan / tagihan wajib pajak.
- 5) Tertib, patuh dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak. Dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak harus ditinjau terlebih dahulu ruang lingkup pembahasannya. Karena jika dibandingkan antara Wajib Pajak PPh, PPN dan PBB sangat berbeda karakter masyarakat Wajib Pajaknya. Hal ini juga dipengaruhi sistemnya dimana PBB dalam penghitungannya masih menganut sistem office assesment sedangkan yang non PBB sudah menganut self assesment. Dalam tesisnya Utomo, Pudjo Susilo (2002) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, menjelaskan bahwa:

- 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor utamanya adalah kepemimpinan, kualitas

pelayanan dan motivasi. Sistem penelitian disertasi yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis yang mengumpulkan data melalui observasi, tamu, wawancara, dan penelitian dokumen. Kepala desa adalah kepala masyarakat, dan kepala desa perlu mengetahui sifat, keadaan, dan kondisi masyarakat yang dipimpinnya. Manajer harus mampu membentuk

- 2) kemudahan untuk merangsang kesadaran yang dipimpin, dalam hal ini adalah kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pelayanan masyarakat merupakan salah satu tugas lurah desa, memberi pelayanan yang berkualitas telah menjadi obsesi yang selalu ingin dicapai. Motivasi adalah dorongan agar orang mau melakukan sesuatu dengan ikhlas dengan sebaik-baiknya. Dan kepemimpinan yang baik, pelayanan yang berkualitas dan motivasi yang baik akan dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- 3) Faktor ekonomi /tingkat pendapatan. Sekretaris Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagaimana dikutip Rohmat Soemitro (1988:299) menyatakan :
“Masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih di bawah penghasilannya sebenarnya mereka peroleh secara rutin”. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.

Faktor Negatif atau yang Menghambat Tingkat Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak. Faktor ini dapat menurunkan tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak. Antara lain:

- 1) Prasangka negatif kepada aparat perpajakan harus digantikan dengan prasangka positif. Sebab, prasangka negatif ini akan menyebabkan para wajib pajak bersikap defensif dan tertutup. Mereka akan cenderung menahan informasi dan tidak kooperatif. Mereka akan berusaha

memperkecil nilai pajak yang dikenakan pada mereka dengan memberikan informasi sesedikit mungkin. Perlu usaha keras dari lembaga perpajakan dan media massa untuk membantu menghilangkan prasangka negatif tersebut.

- 2) Hambatan atau kurangnya intensitas kerjasama dengan Instansi lain (pihak ketiga) guna mendapatkan data mengenai potensi Wajib Pajak baru, terutama dengan instansi daerah atau bukan instansi vertikal.
- 3) Bagi Calon Wajib Pajak, Sistem Self Assessment dianggap menguntungkan, sehingga sebagian besar mereka enggan untuk mendaftarkan dirinya bahkan menghindari kewajiban ber-NPWP. Data-data tentang dirinya selalu diupayakan untuk ditutupi sehingga tidak tersentuh oleh DJP.
- 4) Masih sedikitnya informasi yang semestinya disebarakan dan dapat diterima masyarakat mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara dan segi-segi positif lainnya.
- 5) Adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik (kontra prestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung, bahkan wujud pembangunan sarana prasana belum merata, meluas, apalagi menyentuh pelosok tanah air.
- 6) Adanya anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang pajak.

Sedangkan tentang kesukarelaan Wajib Pajak membayar pajak, secara spesifik faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Apabila Wajib Pajak telah mempunyai kesadaran membayar pajak, maka kewajiban membayar pajak tidak memberatkan lagi dan dengan sukarela Wajib pajak akan membayar pajaknya. DJP akan selalu berupaya membangun kesadaran dan kepedulian serta sukarela Wajib Pajak, karena kegiatan ini sangat berkorelasi secara signifikan dengan pencapaian target penerimaan pajak. Namun demikian, dukungan seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Bahkan Dirjen pajak menyatakan bahwa meningkatkan kesadaran masyarakat adalah tantangan utama DJP. Sebelum menentukan langkah-langkah alternatif untuk membangun kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak, perlunya melandasi pemikiran kita

bahwa kesadaran membayar pajak harus datang dari diri sendiri dan dipupuk sejak masa kanak-kanak. Sebagaimana dijelaskan oleh Dirjen Pajak. Ini adalah isu utama kita. Jika kami (DJP) bersama masyarakat dapat mewujudkannya, maka ke depan penerimaan negara pasti akan meningkat, dan kesadaran membayar pajak harus datang dari diri sendiri.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak antara lain:

1. Melakukan sosialisasi

Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang positif. Beragam bentuk sosialisasi bisa dikelompokkan berdasarkan: metode penyampaian, segmentasi maupun medianya.

Berdasarkan Metode:

Penyampiannya bisa melalui acara yang formal ataupun informal. Acara formal biasanya menggunakan format acara yang disusun sedemikian rupa secara resmi. Contohnya: Sosialisasi bendaharawan, sosialisasi PPh 21 karyawan Pemda, seminar dan sebagainya.

Acara informal biasanya menggunakan format acara yang lebih santai dan tidak resmi. Contohnya: Ngobrol santai dengan wartawan, dengan tokoh masyarakat, dan sebagainya.

Berdasarkan segmentasi:

Bisa membaginya untuk kelompok umur tertentu, kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu, kelompok profesi tertentu, kelompok/ormas tertentu. Menanamkan kesadaran tentang pajak sejak dini,

akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir anak-anak dan menimbulkan rasa kebanggaan terhadap pajak. Contoh yang pernah dilakukan DJP adalah High School Tax Road Show, High School Tax Competition, Tax Goes to Campus, ini merupakan kegiatan yang menimbulkan greget, heboh dan sangat berkesan, bahkan sangat dirindukan muncul lagi oleh kalangan pelajar maupun mahasiswa. Mungkin perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan format yang beragam, kreatif serta inovatif. Perlu diberikan apresiasi kepada salah satu kanwil yang melaksanakan HSTRS ini dengan membuat kegiatan Turnamen Basket Ball antar SMU terpanjang/terlama. Format HSTRS yang diselingi turnamen Basket Ball dengan memindahkan lokasi/tempat pertandingan ke sekolah yang ada lapangan basketnya untuk setiap even itu diadakan, sehingga masyarakat begitu terkesan dengan even ini.

Berdasarkan media yang dipakai:

Sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Misalnya: dilakukan dengan talkshow di radio atau televisi, membuat opini, ulasan dan rubrik tanya jawab di koran, tabloid atau majalah. Iklan pajak pun mempunyai pengaruh dan dampak positif terhadap meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak. Bentuk propaganda lainnya seperti: spanduk, banner, papan iklan/billboard, dan sebagainya

Contoh-contoh sosialisasi lainnya:

- Dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor-kantor dan pemerintah daerah di wilayah kerja, sosialisasi anggota profesi tertentu misalnya notaris, dokter, sosialisasi asosiasi tertentu misalnya asosiasi kontraktor jasa konstruksi, sosialisasi kepada pejabat tertentu, anggota DPR/DPRD, misalnya dengan topik pengisian SPT Tahunan.

- Dapat pula dilakukan dalam bentuk pengarahan secara langsung ke masyarakat melalui pendekatan ke masing-masing kecamatan, desa, sampai RT/RW untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya pajak. Penyuluhan di bidang kesehatan, penyuluhan di bidang

peternakan dan pertanian bisa sukses, pastinya penyuluhan DJP akan bisa lebih sukses didukung dengan tenaga penyuluh yang sangat handal.

- Dapat dilakukan pada kegiatan yang informal di masyarakat. Misalnya pengajian rutin, kerja bakti, pertemuan karang taruna, dan kegiatan masyarakat lainnya.

- Adanya serangkaian kegiatan daerah dan instansi, perusahaan di wilayah kerja pada saat-saat tertentu misalnya Pekan Raya, Pameran dan Promosi dan sebagainya, setidaknya DJP harus dapat menangkap dan ikut serta memeriahkannya dengan membuka stand/pojok pajak.

- Salah satu even rutin yang sangat besar gaungnya adalah Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan. Biasanya dihadiri oleh Bupati/Walikota, sekda, Kepala Dinas dan Muspida yang diharapkan bisa menjadi panutan pajak bagi masyarakat. Namun pada kenyataannya mereka masih banyak yang tidak/belum menyampaikan SPT Tahunan. Biasanya mendekati batas akhir penyampaian SPT Tahunan diadakan acara yang populer diberi nama “Ngisi Bareng SPT” yang membantu para Wajib Pajak dalam mengisi SPT Tahunan.

- Program yang penting juga adalah adanya Tax Center yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi setempat. Sebelum dibentuknya Tax Center biasanya dibuat kesepakatan bersama untuk melakukan kerjasama sosialisasi perpajakan, yang bertujuan untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan. Tax Center akan membantu mensosialisasikan pengetahuan dan pemahaman tentang pajak. Tax center terbuka bagi semua masyarakat. Siapapun yang mengalami kesulitan perihal perpajakan bisa berkonsultasi di pusat perpajakan ini. Perguruan Tinggi akan menyediakan ruang tax center yang nantinya akan dipergunakan sebagai sarana informasi dan pengetahuan tentang perpajakan.

2) Kemudahan diberikan untuk segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan peningkatan kualitas

pelayanan. Jika pelayanannya buruk atau tidak memuaskan, wajib pajak akan enggan untuk datang ke kantor pajak. Pelayanan sebagai wajah DJP harus mencerminkan kebaikan, keanggunan dan kenyamanan. Pelayanan yang berkualitas adalah yang dapat menciptakan kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, pelayanan manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memuaskan Wajib Pajak dan harus dilakukan secara konsisten dan konsisten serta dipelihara dalam standar pelayanan yang dapat dipertimbangkan. DJP harus menerapkan sistem dan administrasi yang sehat dan terus meningkatkan efisiensi administrasi dengan menggunakan teknologi tepat guna. Pelayanan yang terkomputerisasi merupakan salah satu cara untuk mempermudah pelayanan wajib pajak dengan menggunakan teknologi informasi yang tepat guna.

3) Meningkatkan citra Good Governance yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian tercipta pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.

4) Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan

Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Mungkin suatu ide mendirikan sekolah khusus di bidang perpajakan bisa diwujudkan guna mencetak tenaga ahli dan trampil di bidang perpajakan. Atau dapat juga dengan memasukkan materi perpajakan ke dalam kurikulum pendidikan nasional baik di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama sampai perguruan Tinggi. Khusus untuk perguruan Tinggi memang sudah terdapat

materi mata kuliah perpajakan untuk Fakultas tertentu khususnya Fakultas Ekonomi, bahkan sudah ada Diploma Perpajakan. Dalam rangka menyebarkan pengetahuan tentang perpajakan DJP perlu memberikan info gratis baik dengan pamflet, brosur, ataupun buletin, Tentang buletin, kiranya bisa dikreasikan sendiri oleh pihak KP2KP atau KPP untuk menerbitkan buletin dua mingguan atau bulanan. Ide kreatif ini pernah diimplementasikan oleh salah satu KP2KP Jawa Tengah, dan peran konsultan pajak sebagai partner di DJP juga sangat penting. Konsultan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pajak karena mereka dapat memberikan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

5) Law Enforcement

Dengan penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan memberikan deterrent effect yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak. Walaupun DJP berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, namun pemeriksaan harus dapat dipertanggung jawabkan dan bersih dari intervensi apapun sehingga tidak mengaburkan makna penegakan hukum serta dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak.

6) Membangun trust atau kepercayaan masyarakat terhadap pajak

Akibat kasus Gayus kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak menurun sehingga upaya penghimpunan pajak tidak optimal. Atas kasus seperti Gayus itu para aparat perpajakan seharusnya dapat merespon dan menjelaskan dengan tegas bahwa jika masyarakat mendapatkan informasi bahwa ada korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, jangan hanya memandang informasi ini dari sudut yang sempit saja. Jika tidak segera dijelaskan maka masyarakat kemudian bersikap resistance dan enggan membayar pajak karena beranggapan bahwa pajak yang dibayarkannya paling-paling hanya akan dikorupsi. Masyarakat berpendapat hanya sedikit

sekali yang akan kembali kepada wajib pajak atau disumbangkan dalam pembangunan bangsa. Jadi lebih baik tidak perlu membayar pajak saja. Kesimpulan seperti ini dihasilkan dari informasi dan pandangan yang tidak menyeluruh. Apakah korupsi terjadi pada seluruh bagian dari institusi perpajakan? Tentu tidak. Apakah sampai dengan saat ini tidak ada usaha untuk memberantas korupsi? Usaha yang selama ini dilakukan untuk memberantas korupsi harus mendapat dukungan oleh seluruh lapisan masyarakat. Yaitu dengan tetap membayar pajak dan ikut mengawasi pengelolaannya. Sesuai dengan iklan pajak “LUNASI PAJAKNYA AWASI PENGGUNAANNYA’. Hal ini tentunya memerlukan adanya transparansi dan akuntabilitas dari DJP. DJP harus senantiasa berusaha membangun kepercayaan para wajib pajak kemudian seharusnya menjamin dan menjawab kepercayaan tersebut dengan melakukan pembenahan internal. Sehingga terwujudkan kondisi dimana masyarakat benar-benar merasa percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak akan dikorupsi dan akan disalurkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

7) Merealisasikan program Sensus Perpajakan Nasional yang dapat menjaring potensi pajak yang belum tergali. Dengan program sensus ini diharapkan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami masalah perpajakan serta sekaligus dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian, sukarela menjadi Wajib Pajak dan membayar Pajak. Semoga Direktorat Jenderal Pajak tetap konsisten dan kontinyu untuk membangun kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak demi tercapainya cita-cita dan tujuannya.

3.6 Usulan Pemecahan Masalah/Solusi

Dalam menghadapi kendala yang telah dipaparkan sebelumnya, maka praktikan memberikan beberapa solusi yang mungkin dapat menjadi daftar masukan bagi KPP Pratama Jombang. Solusi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Disediakan tempat yang lebih memadai dan cukup luas untuk dapat menampung berkas-berkas dan dokumen yang ada.

2. Dilakukan penataan ruang seefisien mungkin agar pegawai dan karyawan yang bekerja lebih nyaman serta agar berkas-berkas dan dokumen lebih rapi dan agar dapat memaksimalkan pekerjaan yang ada dengan penataan ruang yang sesuai.
3. Menambah pegawai yang ditempatkan di bagian rumah berkas sehingga pekerjaan yang banyak dapat di *handle* oleh beberapa pegawai dan pekerjaan cepat diselesaikan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kuliah magang merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa pada semester terakhir (semester 7) kurikulum S1 Manajemen, dan merupakan kegiatan kurikulum terstruktur dalam bentuk praktik pada institusi yang berkaitan dengan bidang ekonomi (khususnya bisnis). Pelatihan praktek (KKM) selama kurang lebih 6 minggu ini tidak banyak mengalami kendala. Kuliah Kerja Nyata (KKM) ini sebenarnya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bekerja di bidang yang sama di kemudian hari. Dalam kuliah praktek kerja praktek (KKM) ini, mahasiswa dapat mempraktekkan apa yang telah diterimanya di dunia perkuliahan secara langsung, walaupun ada sedikit perbedaan yang sangat membantu untuk kegiatan selama magang.

Dari hasil penelitian dan pengamatan di lapangan, penulis mengambil kesimpulan bahwa ketaatan pajak masyarakat perlu ditingkatkan lagi Hal ini tentunya memerlukan adanya transparansi dan akuntabilitas dari DJP. DJP harus senantiasa berusaha membangun kepercayaan para wajib pajak kemudian seharusnya menjamin dan menjawab kepercayaan tersebut dengan melakukan pembenahan internal. Sehingga terwujudkan kondisi dimana masyarakat benar-benar merasa percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak akan dikorupsi dan akan disalurkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, dapat direkomendasikan saran- saran sebagai berikut, Masyarakat lebih mencari tahu akan keuntungan pembayaran pajak dengan membuka web atau membaca berbagai media mengenai perpajakan serta harus adanya sosialisasi lebih dari pemerintah mengenai manfaat pajak bagi warga Negara serta pembangunan Negara demi kemajuan bangsa.

Selama kegiatan KKM berlangsung, praktikan menyadari adanya berbagai kekurangan dalam pelaksanaan KKM. Untuk itu praktikan memberikan beberapa

masukan yang diharap dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Beberapa masukan tersebut adalah :

1. Untuk Mahasiswa magang

Semua Mahasiswa magang dapat mendukung pelaksanaan KKM Praktek Kerja Lapangan, yang akan disampaikan lebih siap dalam hal keterampilan individu dan pengetahuan akademik yang diperoleh di dunia pengajaran. hujan. Mahasiswa peserta pelatihan hendaknya lebih waspada, fokus dan waspada dalam menyelesaikan tugas serta memperhatikan efektifitas waktu yang tersedia untuk menghindari kesalahan dan penumpukan tanggung jawab pekerjaan yang dapat mengganggu pekerjaan jabatan lain.

2. Program Magang (KKM) Lebih aktif mencari informasi di Fakultas terkait tentang pengalaman, karir dan tantangan yang biasanya dihadapi di lingkungan KKM (Program Magang).Bagi STIE PGRI Dewantara Jombang

Pelaksanaan (Kuliah Kerja Magang) KKM sebaiknya dilakukan pada jadwal libur semester. Karena jika (Kuliah Kerja Magang) KKM dilakukan ketika jadwal aktif perkuliahan, mahasiswa diarsa kurang focus, dimana mahasiswa harus membagi focus, waktu dan konsentrasi antara kewajiban untuk melaksanakan (Kuliah Kerja Magang) KKM dengan perkuliahan mata kuliah yang menggunakan sistem perkuliahan dilakukan secara daring/luring maupun offline, akibatnya pemenuhan tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa/mahasiswi menjadi kurang maksimal.

Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang

- a. Mampu mempertahankan dan meningkatkan pelayanan yang selalu ramah bagi setiap Wajib Pajak agar terjalin hubungan yang baik antara wajib pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang.
- b. Diharapkan KPP Pratama Jombang dapat memberikan bimbingan yang lebih intens bagi mahasiswa/mahasiswi yang sedang melaksanakan magang dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan agar tidak banyak terjadi kesalahan.

- c. Bisa menjaga, meningkatkan, dan mempertahankan hubungan yang baik dengan perusahaan atau instansi pemerintahan, serta fakultas-fakultas yang ada agar mempermudah mahasiswa/mahasiswi dalam mendapatkan tempat magang.

4.3 Refleksi Diri

4.3.1 Relevansi

Kegiatan dan tugas yang dilakukan selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKM) sangat bermanfaat dan relevan dengan proses perpajakan kelas yaitu teori manajemen sdm.

4.3.2 Pengalaman

Praktisi bisa mendapatkan banyak pengalaman selama kegiatan KKM ini, salah satunya yaitu soft skill dan tetap menjaga etos kerja selama KKM. Praktisi juga mendapatkan pengalaman dalam menjaga kerja tim, komunikasi, disiplin bisnis, dan integritas bisnis.

4.3.3. Manfaat yang diperoleh

Selama kegiatan KKM, manfaat yang diperoleh yaitu sebagai media pengembangan kemampuan kognitif mahasiswa/mahasiswi yaitu konsentrasi, perhatian, dan kecepatan respon dengan selektif ketika diberikannya beberapa tugas yang dipercayakan kepada mahasiswa/mahasiswi yang sedang melaksanakan magang di KPP Pratama Jombang.

4.3.4 Tindak Lanjut

Perencanaan tindak lanjut dilakukan setelah selesainya program Studi Magang (KKM), dimana para praktisi akan terus mengembangkan softskill selama magang, belajar dari dan memperbaiki kesalahan yang ada, dan fokus ke depan. Pada tahun 2022, Anda akan menyelesaikan studi sesuai keinginan dan melanjutkan skripsi di semester 8 untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1). Selain itu, praktisi sangat berharap setelah menyelesaikan gelar

ini akan lebih mudah bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan hobi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

2018. Oktober 1. <https://pajak.go.id/berita/sah-kpp-jombang-mulai-beroperasi>.
- Alumni, Moekijat. 1984. Kamus Management. Bandung :. n.d.
- andi. 2001. januari. <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/pendataan-keluarga-2021-dilakukan-april-mei-ini-manfaat-pentingnya#:~:text=Pendataan%20dilakukan%20untuk%20basis%20data,perencanaan%20berdasarkan%20data%20yang%20akur> .
- Mardiasmo. 2006. *disi Revisi 2006*. Mardiasmo. 2006. Perpajakan (Edisi Revisi 2006). Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Siti, Resmi. n.d. *Edisi 4*). Resmi Siti. 1994. Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi 4). Jakarta : Salemba Empat.
- Sobandi, Miftakhussalam. 2015. *Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Perolehan Pajak* .
https://www.academia.edu/10078818/target_penerimaan_pajak_dan_pengembangan_SDM_2015.
- Susanto, Herry. 2012. Januari 09. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Melaksanakan Magang



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JOMBANG**

JALAN KH. ABDURRAHMAN WAHID NO.157, CANDIMULYO, KABUPATEN JOMBANG
TELEPON (0321) 861609; FAKSIMILE (0321) 878490; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S-973/WPJ.24/KP.16/2021 26 Oktober 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Jawaban atas Permohonan Izin Kuliah Kerja Magang

Yth. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PGRI Dewantara Jombang
Jalan Prof. Moh. Yamin No. 77 Jombang

Sehubungan dengan surat Saudara nomor:

- a. 721.N/STIE.PGRI.DW.JB/KM/2021 tanggal 29 September 2021;
- b. 629.A/STIE.PGRI.DW.JB/KM/2021 tanggal 29 September 2021;
- c. 723.A/STIE.PGRI.DW.JB/KM/2021 tanggal 02 Oktober 2021;
- d. 723.B/STIE.PGRI.DW.JB/KM/2021 tanggal 02 Oktober 2021;
- e. 723.C/STIE.PGRI.DW.JB/KM/2021 tanggal 03 Oktober 2021;
- f. 734.A/STIE.PGRI.DW.JB/KM/2021 tanggal 04 Oktober 2021;
- g. 758.A/STIE.PGRI.DW.JB/KM/2021 tanggal 11 Oktober 2021;
- h. 757.N/STIE.PGRI.DW.JB/KM/2021 tanggal 11 Oktober 2021;

hal Permohonan Kuliah Kerja Magang, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan izin kepada mahasiswa/mahasiswi terlampir untuk magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang dengan ketentuan:

1. tidak diperkenankan bagi yang bersangkutan untuk meminjam dan/atau menggandakan dokumen-dokumen yang menjadi rahasia negara dan/atau rahasia jabatan;
2. selama kegiatan Magang diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan terkait Covid-19;
3. setelah selesai melaksanakan Magang agar mengirimkan *softcopy* laporan ke KPP Pratama Jombang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Ekawati Surjaningsih



Lampiran 2. Daftar Mahasiswa/Mahasiswa yang Melakukan Magang


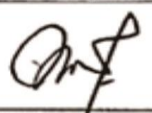

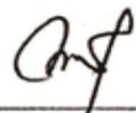
**DAFTAR MAHASISWA/MAHASISWI DITERIMA
KULIAH KERJA MAGANG (KKM) DI KPP PRATAMA JOMBANG**

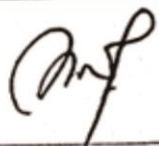
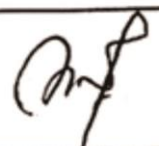


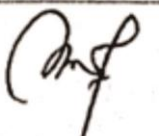

No.	NIM	Nama	Prodi	Jadwal Pelaksanaan KKM
1	1861007	Intan Tera Amelia Putri	Manajemen	01 November s.d. 15 Desember 2021
2	1861198	Edi Wahyu Arianto	Manajemen	01 November s.d. 15 Desember 2021
3	1861196	Alvin Nur Azizah	Manajemen	01 November s.d. 15 Desember 2021
4	1862030	Fatma Oktavilani	Akuntansi	01 Desember 2021 s.d. 03 Januari 2022
5	1861295	Erwin Himawan	Manajemen	01 Desember 2021 s.d. 03 Januari 2022
6	1862032	Pitanti Wahyu Ambarwati	Akuntansi	01 Desember 2021 s.d. 03 Januari 2022
7	1862101	Dwi Zafani	Akuntansi	01 s.d. 30 Desember 2021
8	1862221	Vani Rahmadiani	Akuntansi	01 s.d. 30 Desember 2021



FORMULIR KEGIATAN HARIAN MAHASISWA

Nama : Erwin Himawan
 NIM : 1861295
 Program Studi : Manajemen
 Tempat KKM : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang
 Bagian/Bidang : -Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan
 -Pemberkasan

Minggu ke	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
I	01-Des-21	Input Dan Arsip Berkas Pendaftaran NPWP	
	02-Des-21	Input Dan Arsip Berkas Pendaftaran NPWP	
	03-Des-21	Work From Home	
	04-Des-21	Libur	
	05-Des-21	Libur	
II	06-Des-21	Work From Home	
	07-Des-21	Work From Home	
	08-Des-21	Input Dan Arsip Berkas Pendaftaran NPWP	
	09-Des-21	Input Dan Arsip Berkas Pendaftaran NPWP	
	10-Des-21	Work From Home	
	11-Des-21	Libur	
	12-Des-21	Libur	

III	13-Des-21	Work From Home	
	14-Des-21	Input Dan Arsip Berkas Pendaftaran NPWP	
	15-Des-21	Izin ke Kampus	
	16-Des-21	Work From Home	
	17-Des-21	Work From Home	
	18-Des-21	Libur	
	19-Des-21	Libur	
IV	20-Des-21	Input Dan Arsip Berkas Pendaftaran NPWP	
	21-Des-21	Mengecek Data NPWP di Link KPP	
	22-Des-21	Input Dan Arsip Berkas Pendaftaran NPWP	
	23-Des-21	Work From Home	
	24-Des-21	Work From Home	
	25-Des-21	Libur	
	26-Des-21	Libur	
V	27-Des-21	Work From Home	
	28-Des-21	Work From Home	
	29-Des-21	Input Dan Arsip Berkas Pendaftaran NPWP	
	30-Des-21	Input Dan Arsip Berkas Pendaftaran NPWP	

	31-Des-21	Input Dan Arsip Berkas Pendaftaran NPWP	<i>Ans</i>
	01-Jan-21	Libur	
	02-Jan-21	Libur	
VI	03-Jan-22	Input Dan Arsip Berkas Pendaftaran NPWP	<i>Ans</i>
	04-Jan-21	Work From Home	
	05-Jan-21	Input Dan Arsip Berkas Pendaftaran NPWP	<i>Ans</i>

Jombang, 4 Januari 2022

Pendamping Lapangan



Andika Darma Saputra
 Andika Darma Saputra
 (NIP.19841218 200412 1 001)

Lampiran 4. Penilaian Pendamping Lapangan

Nama : Erwin Himawan
 NIM : 1861295
 Kelas : Manajemen SDM KP C 2018

Aspek-aspek penilaian oleh pendamping lapangan
Tabel Aspek Penilaian oleh Pendamping Lapangan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai
1.	Disiplin kerja	95
2.	Kerjasama dalam tim/hubungan dengan rekan kerja	94
3.	Sikap, etika dan tingkah laku saat bekerja	95
4.	Kreativitas dan ketrampilan	92
5.	Kemampuan mengaplikasikan pengetahuan akademis dalam pekerjaan	93
6.	Kemampuan menyesuaikan diri dalam pekerjaan dan lingkungan kerja	92
7.	Kemampuan berkomunikasi	94
8.	Produktivitas kerja	93
TOTAL NILAI		
NILAI RATA-RATA		

Catatan : Penilaian harap diisi dengan angka
 Catatan:.....

Jombang, 4 Januari 2022
 Pendamping Lapangan




 Andika Darma Saputra
 (NIP.19841218 200412 1 001)

Lampiran 5. Curriculum Vitae (CV)

Curriculum Vitae



Data Pribadi	
Nama	Erwin Himawan
Semester	VII Gasal
NIM	1862181
Program Studi	Manajemen
Tempat, Tgl Lahir	Jombang, 24 Februari 2000
Alamat Asal	Dsn. Kramat, Ds. Tanggung Kramat RT.02/RW.02, Kec. Ploso, Kab. Jombang
Jenis Kelamin	Laki-laki
Status	Belum Menikah
Agama	Islam
Kewarganegaraan	Indonesia
No. HP / Telp.	085748523365
E – mail	erwinhimawan00@gmail.com
Pendidikan Akhir	SMA

Riwayat Pendidikan	
2006 – 2012	SD NEGERI KARANGMOJO 1
2012 – 2015	SMP NEGERI 1 PLANDAAN
2015 – 2018	SMA NEGERI PLANDAAN
2018 - Sekarang	STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Jombang, 4 Januari 2022

Hormat saya,

Erwin Himawan
NIM. 1861295

Lampiran 6.Dokumentasi



